

**RELASI KUASA ANTARA KORPORASI DENGAN PETANI
(Studi kasus Kemitraan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Cabang Sidrap, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidrap)**

*Power Relation Between Cooperatives and Farmers : A Case Study of
Partnerhsips at PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sidrap Branch,
Maritengngae District, Sidrap Regency*

ANDI MURNI

E032201002



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

RELASI KUASA ANTARA KORPORASI DENGAN PETANI

**(Studi Kasus Kemitraan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Cabang Sidrap, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidrap)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI MURNI
E032201002**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

RELASI KUASA ANTARA KORPORASI DENGAN PETANI
(Studi Kasus Kemitraan Pada PT.Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap)

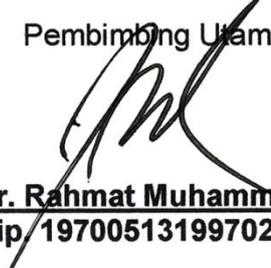
Disusun dan diajukan oleh

ANDI MURNI
E032201002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **10 September 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

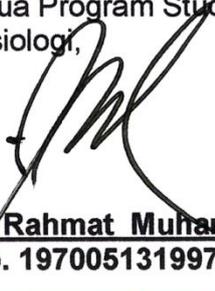
Pembimbing Utama,


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
Nip. 197005131997021002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sakaria To Anwar M.Si.
Nip. 196901302006041001

Ketua Program Studi Sosiologi,


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
Nip. 197005131997021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Murni
N.I.M. : E032201002
Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 September 2021



Andi Murni

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah penulis panjatkan atas limpahan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penyusunan karya tulis tesis ini dapat diselesaikan. Sejak proses penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis nyatakan kepada guru penulis yang sekaligus menjadi ketua tim penasehat Dr. Rahmat Muhammad, M.Si yang membimbing penulis kearah pengembangan intelektual penyusunan karya tulis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada guru penulis yang sekaligus pembimbing kedua, Dr. Sakaria To Anwar, M.Si. yang telah banyak memberikan bimbingan, referensi serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis nyatakan kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku rektor Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Armin Arsyad selaku Dekan FISIP Unhas Makassar, beserta jajarannya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian Studi.

Kepada Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. selaku ketua program studi Magister sosiologi Unhas yang juga sebagai guru penulis yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penyelesaian studi. Kepada para Tim penguji tesis, Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU., Dr. Sawedi, M.A dan Dr. Nuvida RAF, S.sos., MA. yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat bermanfaat terhadap penulisan tesis ini.

Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh bapak dan ibu Dosen Departemen Sosiologi atas berbagai dorongan moral dan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian tesis ini. Kepada bapak Irman dan seluruh staf akademik pacasarjana FISIP yang banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi magister. Kepada sahabat-sahabat penulis mahasiswa magister Sosiologi Unhas kelas 2020-1 yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian studi, Fatma, Yudith, Kristian, Rahmat, Farhan, Irsyam, Catur, Arif.

Kepada Kelompok Tani yang bermitra dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dan manajemen PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebaikan hati dan kesediaan yang selalu menerima penulis dalam kesibukannya untuk memberikan keterangan-keterangan yang sangat membantu dalam penulisan tesis ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula kepada Bupati Sidrap dalam hal ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu kabupaten Sidrap, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sekaligus telah memberikan keterangan-keterangan yang bermanfaat dalam penulisan tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda kami yang tercinta, H. Andi Baso dan dan Ibunda Hj. Andi Hasnah. Mertuaku Abah KH. Andi Manshur dan saudara-saudaraku yang tercinta atas segala doa restu dan nasihat serta bantuan yang diberikan kepada penulis.

Khususnya kepada Suamiku yang tercinta Dr. Andi Muhammad Sabiq, M.Si., terimakasih telah menjadi teman diskusi, membimbing dan selalu memotivasi penulis serta anak-anakku tersayang Andi Muh. Fadil Azhari, Andi Muh. Fikram Azhari dan Andi Muh. Fakhri Azhari yang penuh pengertian dan kesabaran selama ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menjalani proses perkuliahan. Semoga segala kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala disisi Allah SubhanahuWaTa'ala. Aamiin

Makassar, 10 September 2021

Andi Murni

ABSTRAK

ANDI MURNI. *Relasi Kuasa antara Korporasi dengan Petani (Studi Kasus Kemitraan pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap)* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Sakaria To Anwar).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi kuasa melalui analisis kemitraan, hegemoni, dan peran aktor antara korporasi PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dengan petani. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan adalah subkontrak, dimana pihak mitra menyediakan kebutuhan bahan baku sebagai komponen produksi perusahaan. Relasi kuasa berjalan dalam kemitraan, dimana kemitraan mutualistik yang menjadi tujuan bermitra dalam prosesnya mengalami perubahan dan cenderung tidak seimbang. Kekuasaan pada korporasi menjadi dominasi dalam rangkaian kemitraan tersebut. Hegemoni dalam kemitraan kasus bukan secara dominasi dengan paksaan tetapi berjalan seiring dengan persetujuan perjanjian kerjasama. Kontrak kerjasama yang dibuat satu pihak menjadi instrumen hegemoni, terdapat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban, isi perjanjian dengan proses yang berjalan. Kualitas mutu benih yang menjadi syarat utama tidak disertai dengan bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta tidak adanya kepastian waktu pembayaran pembelian hasil panen petani mitra. Peran aktor dalam kemitraan sangat dinamis, disebabkan tidak terlaksananya kontrak perjanjian secara maksimal. Peran pemerintah, utamanya dari pemerintah desa sangat terbatas karena ruang mereka ditutup oleh pelaku kemitraan itu sendiri. Kemitraan akan berjalan dengan baik jika pelaku kemitraan menempatkan posisi dimana seharusnya mereka berada dan apa yang seharusnya mereka lakukan.

Kata kunci: Relasi Kuasa, Hegemoni, Kemitraan, Peran Aktor



ABSTRACT

ANDI MURNI. *Power Relation Between Cooperatives and Farmers: A Case Study of Partnerships at PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sidrap Branch, Maritengngae District, Sidrap Regency* (supervised by **Rahmat Muhammad** and **Sakaria To Anwar**)

The aim of this study is to explain power relation through the analysis of partnerships, hegemony, and the role of actors between PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sidrap Branch and farmers.

The method used in this study was qualitative analysis with a case study approach.

The results of the study indicate that the partnership pattern applied is sub-contract, where the partner provides the need of raw materials as a component of the company's production. Power relation runs in partnership, where the mutualistic partnership which is the goal of partnering in the process changes and tends to be unbalanced. The power in the corporation becomes the dominance in the series of partnerships. Hegemony in case partnership is not dominated by coercion, but it goes hand in hand with the agreement of a cooperation agreement. Cooperation contract made by one party becomes an instrument of hegemony. There is a discrepancy between rights, obligations, and the contents of the agreement and the ongoing process. The quality of seed quality which is the main requirement is not accompanied by the assistance of agricultural facilities and infrastructures, and there is no certainty of payment for the purchase of partner farmers' crops. The role of the actor in the partnership is very dynamic due to the non-execution of the contract agreement optimally. The role of the government, especially from the village government, is very limited because their space is closed by the partnership actors themselves. Partnerships will work well if the partners put in a position where they should be and what they should do.

Keywords: power relation, hegemony, partnership, actor's role



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemitraan.....	12
B. Bentuk Kemitraan.....	14
C. Relasi Kuasa Dalam Kemitraan.....	28
D. Peran Aktor dalam Kemitraan.....	37
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	43
F. Kerangka Pikir.....	51
G. Skema Kerangka Pikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian.....	54
C. Informan Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	57

E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisa Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT.Sang Hyang Seri (Persero) di Kabupaten Sidrap.....	63
2. Kelompok Tani	78
B. Bentuk Kemitraan antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dan Petani	92
C. Hegemoni dalam Kemitraan Antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dengan Petani.....	99
1. Hegemoni dalam Kemitraan	101
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Petani Penangkar	119
D. Pola Aktor Memainkan Peran dalam Kemitraan Antara Petani, Pemerintah.....	125
1. Peran Korporasi	127
2. Peran Petani	140
3. Peran Pemerintah	152
4. Peran Masyarakat.....	155

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	161
B. Saran	163

DAFTAR PUSTAKA.....	164
----------------------------	------------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian, 2021	46
Tabel 2. Matriks Kriteria Informan, 2021	56
Tabel 3. Matriks Pengembangan Konsep menjadi sub Konsep untuk Penelitian Kualitatif, 2021	61
Tabel 4. Matriks Hegemoni Kemitraan, 2021	115
Tabel 5. Hak dan Kewajiban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kepada Petani Penangkar, 2021.....	120
Tabel 6. Hak dan Kewajiban Petani Penangkar kepada Perusahaan (PT. SHS), 2021.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir, 2021	53
Gambar 2. Skema Proses Kemitraan antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dengan Petani Penangkar, 2021.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Wawancara Informan
- Lampiran 3 : SK Pengangkatan Panitia Penguji
- Lampiran 4 : Surat Izin Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian PTSP
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian Kabupaten Sidrap
- Lampiran 7 : Surat Izin Melaksanakan Penelitian di PT. SHS
Cabang Sidrap
- Lampiran 8 : Contoh Kontrak Penawaran Kerjasama dengan PT. Sang
Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap
- Lampiran 9 : Contoh Kontrak Perjanjian Kerjasama dengan PT. Sang
Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap
- Lampiran 10 : Laporan Pemeriksaan Pertanaman
- Lampiran 11 : Lampiran Kontrak Perjanjian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembangunan pertanian merupakan bagian internal dari pembangunan nasional yang memiliki makna sentral karena peranannya dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi perekonomian bangsa. Keberhasilan disektor pertanian ditandai dengan tercapainya swasembada pangan, tetapi keberhasilan ini belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena masih terdapat ketimpangan yang menimbulkan gejolak sosial. Kalau pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan dan kurang terfokus pada pemerataan, maka keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal mutlak yang diperlukan untuk memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus meredam dampak negatif dari pembangunan tersebut.

Perkembangan modernisasi pertanian di Indonesia dewasa ini semakin pesat, dalam rangka menunjang stok pangan nasional. Perkembangan terus menerus dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi pangan yang begitu pesat memungkinkan meningkatnya produksi baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Walaupun demikian peningkatan produksi ini masih terus dibayangi oleh laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian bersifat multi sektor yang melibatkan berbagai unsur diantaranya perdagangan, kesehatan, informasi, perencanaan wilayah, koperasi, maupun usaha kecil dan menengah. Untuk itu kemitraan atau kerjasama sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di Indonesia, baik kerjasama antara institusi pemerintahan, pihak swasta, maupun masyarakat.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu pilar utama pangan nasional, sebagai daerah lumbung beras produksi padi tentu saja menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Selain karena merupakan makanan pokok masyarakat pada umumnya, padi juga merupakan tanaman pangan yang merupakan sumber ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan. Kabupaten Sidrap merupakan kontributor utama produksi beras di Sulawesi Selatan. Petani mampu memanen hingga tiga kali dalam setahun, upaya peningkatan produksi padi terus diupayakan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Dalam rangka meningkatkan produksi, selain penggunaan teknologi dan memberikan bimbingan kepada petani serta pengolahan yang maksimal diperlukan juga penggunaan benih dengan kualitas yang baik.

Salah satu perusahaan yang bertanggung jawab terhadap perbanyakan dan distribusi benih berkualitas adalah PT. Sang Hyang Seri (Persero). Untuk wilayah Indonesia Timur penempatan Cabang

perusahaan ini di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

PT. Sang Hyang Seri (Persero) merupakan perintis dan pelopor usaha perbenihan di Indonesia. Pendirian industri ini berdasarkan peraturan pemerintah No.44 tahun 1985 tanggal 28 November 1985. Lebih dari itu, perusahaan ini adalah satu-satunya milik BUMN yang mempunyai *core business* perbenihan pertanian dengan kualitas produksi cukup bagus. Kualitas produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang bagus itu tidak lepas dari pengaruh pengaturan suhu dan lama penyimpanan terhadap mutu benih yang menjadi perhatian manajemen perusahaan. Perusahaan menerapkan perlakuan suhu dan lama penyimpanan yang terbaik untuk menjaga kualitas produk. Ada dua langkah penting untuk menjaga kualitas produksi tetap maksimal. Pertama, tempat penyimpanan yang di *Cooling Room* pada waktu 7 hari setelah penyimpanan. Hal itu dianggap penting karena masih stabilnya kadar air dan daya kecambahnya masih tinggi, walaupun terjadi perubahan naiknya kadar air dan turunnya daya kecambah tidak terlalu drastis. Kedua, tempat penyimpanan yang di gudang biasa pada waktu 7 hari setelah penyimpanan, karena masih stabilnya kadar air dan daya kecambahnya masih tinggi, tetapi terjadi perubahan naiknya kadar air dan turunnya daya kecambah yang drastis (Dewi, 2015).

Perseroan Terbatas (PT) Sang Hyang Seri (Persero) adalah perusahaan besar, yang memiliki karyawan cukup berprestasi dengan skill

sangat baik. Para karyawan yang bekerja di perseroan ini memiliki motivasi yang cukup tinggi, baik itu bersumber dari dalam diri (intrinsik) dan maupun dari luar (ekstrinsik). Motivasi itu tidak dapat dilepaskan pula dari kepuasan karyawan bekerja di perusahaan. Motivasi yang kuat baik dari dalam dan luar ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, yang pada akhirnya kinerja karyawan cukup berkualitas tinggi. Secara umum, PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah tempat yang tepat untuk bekerja.

PT Sang Hyang Seri (Persero) memiliki sistem manajerial yang bagus. Pihak manajemen berpikir keras agar karyawan puas dengan perusahaan, kualitas kinerjanya meningkat, dan produktifitasnya tinggi. Salah satu upayanya terkait pemotongan pajak. Strategi perpajakan ini juga akan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya atau meningkatkan kinerjanya. PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap telah melakukannya, agar pendapatan yang diperoleh karyawan lebih besar, sebuah kepedulian yang dirasakan langsung oleh karyawan (Yunus, 2019). Artinya manajemen PT Sang Hyang Seri (Persero) terus memikirkan bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi karyawan, khususnya di bidang perpajakan, agar pendapatan kerja tinggi dan berdampak pada kualitas kinerja maupun motivasi mereka.

Segala daya untuk menjalankan operasional perusahaan serta menjamin ketersediaan bahan baku secara kontinyu, maka pihak perusahaan membina hubungan kerjasama dengan petani, tidak hanya

menyalurkan benih tetapi perusahaan ini juga memperoleh calon benih dari petani penangkar. PT.Sang Hyang Seri (Persero) dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan penyedia benih unggul melakukan penangkaran calon benih diareal persawahan milik petani penangkar. Petani tersebut menjadi petani binaan dari perusahaan, mereka diberi bimbingan cara memproduksi calon benih padi mulai dari penyiapan areal penanaman, pemeliharaan, sampai proses pemanenan.

Kemitraan yang dilakukan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku benih perusahaan dan sebagai upaya pemberdayaan petani, Menjadi petani binaan merupakan salah satu cara untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan petani, karena pada umumnya mereka lemah dalam aktifitas ekonomi yang dilakukannya. Kelemahan petani bersumber dari pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai, permodalan yang kurang, sampai kepada pertanian itu sendiri yang mendatangkan berbagai kelemahan kedudukan petani seperti lahan yang terpecah, ketergantungan terhadap iklim dan rawan bencana alam, serta waktu yang cukup lama antara menanam dan menghasilkan. Kehadiran perusahaan dengan melaksanakan kemitraan menjadi peluang bagi petani untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka juga sebagai sarana untuk alih teknologi, pengetahuan, dan keterampilan. Kemitraan merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan sosial, karena

dengan kemitraan maka dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

Relasi kemitraan pada hakikatnya adalah relasi saling ketergantungan. Pasal 1 angka 13 UU 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan dengan detail bahwa dalam hal pelaksanaan kemitraan, pada dasarnya hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil adalah hubungan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Saling ketergantungan antar pihak meniscayakan adanya aturan tentang larangan yang tidak bisa dilanggar. Pelanggaran yang terjadi, misalnya merugikan pihak mitra tertentu, maka hal itu akan dianggap melanggar pasal-pasal yang berlaku. Prinsip saling menguntungkan ini harus betul-betul dijaga.

Kerjasama kemitraan yang dilakukan perusahaan dengan petani dalam satu jenis kerjasama yaitu penangkaran calon benih padi, kemitraan ini dimulai setiap musim tanam dan banyak petani mitra yang berganti tetapi ada juga petani mitra yang sudah membina kemitraan selama 20 tahun. Kemitraan yang diawali dengan pencarian areal kerjasama dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerjasama, dalam hal ini idealnya kedua pihak harus saling bersepakat terlebih dahulu terhadap apa yang dianggap perlu dilakukan untuk kelancaran kemitraan. Apalagi dalam pelaksanaan kemitraan ini pihak petani menggunakan lahan sendiri, maka seharusnya petani juga mempunyai kemampuan untuk

mengontrol bukan hanya sekedar menyepakati dan menjalankan aturan-aturan dalam kemitraan tersebut, sehingga akan lebih menguntungkan perusahaan. Tetapi dalam pelaksanaannya isi kontrak kerjasama yang kemudian menjadi perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dibuat oleh pihak perusahaan dan petani mitra hanya menyetujui dan menjalankan aturan-aturan didalamnya. Setelah pembuatan kontrak maka proses penangkaran dimulai dengan pengolahan tanah, penanaman sampai tahap panen. Pelaksanaan proses produksi inilah yang diatur dalam kontrak kerjasama, bagaimana hak dan kewajiban kedua pihak. Petani mitra berkewajiban untuk menghasilkan calon benih berkualitas dan untuk meningkatkan kualitas calon benih maka sarana produksi seperti peralatan usahatani, pupuk dan pestisida menjadi faktor penunjang jalannya proses usahatani, dan pihak perusahaan tidak memberi bantuan kepada petani mitra, semua harus disiapkan oleh petani mitra tersebut sementara petani terkadang kekurangan modal kerja. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberi bimbingan teknis dan pengawasan tetapi terbatasnya petugas lapangan menyebabkan petani mitra tidak mendapatkan pengawasan maksimal. Sementara pada saat petani mitra mengalami gagal panen mereka diwajibkan untuk tetap membayar benih pokok yang telah mereka gunakan.

Setelah waktu panen maka perusahaan akan menguasai hasil produksi petani mitra, tetapi perusahaan tidak membayar secara langsung

calon benih hasil panangkaran petani mitra melainkan harus menunggu hingga beberapa bulan karena sistem yang berjalan dalam perusahaan. Proses pembayaran menjadi satu masalah yang menyebabkan berkurangnya keinginan petani untuk bermitra dengan perusahaan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kemitraan kasus, karena kondisi yang dikemukakan diatas tentu saja bukan sebuah kondisi ideal dalam bermitra karena pihak perusahaan lebih mendominasi dan akan lebih diuntungkan sedangkan petani hanya menjadi pekerja yang terus menyediakan stok calon benih dengan tidak mendapatkan keuntungan maksimal jika hanya berharap dari pembelian perusahaan. Posisi petani sepertinya menjadi pihak yang lebih membutuhkan padahal jika ditinjau dari tingkat urgensi ketersediaan bahan baku maka pihak perusahaanlah yang sangat tergantung kepada petani, tetapi pihak perusahaan justru yang mengontrol jalannya kemitraan dan petani menjadi pelaksana kebutuhan perusahaan.

Hegemoni pada struktur kekuasaan itu menjadi legal formal, diakui dan disepakati bersama, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak eksternal manapun, ketika sudah diformat menjadi sebuah perjanjian kemitraan. Individu yang menjalin hubungan atau relasi kemitraan dengan individu atau kelompok dan lembaga lain maka pada saat itulah kekuasaan yang tercipta sudah menjadi struktur sosial mapan, yang bahkan berkekuatan hukum, apalagi dalam konteks negeri hukum Republik Indonesia ini. Pemerintah telah menerbitkan undang-undang

kemitraan yang poin-poinnya mengatur bagaimana kekuasaan didefinisikan oleh kacamata hukum, harus dipatuhi dan pelanggaran akan mendatangkan sanksi administratif, bahkan sanksi atas tuduhan tindakan kriminal. Kerjasama kemitraan membuat relasi sosial berkekuatan hukum, demikian pula dengan kekuasaan yang terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil fokus pada kasus kemitraan antara petani penangkar dan korporasi, teori hegemoni Antonio Gramsci digunakan dalam menganalisis kasus, untuk menjelaskan bagaimana dominasi dalam kemitraan yang berjalan, karena nilai intrinsik kasus kemitraan ini sangatlah penting. Di dalam proses kemitraan tersebut terkandung sebuah relasi sosial yang bermasalah yaitu adanya;

1. Relasi kekuasaan yang tidak sehat dan membentuk satu pola hegemoni yang merugikan.
2. Masyarakat memiliki peluang untuk menentukan sikap dirinya yang mandiri dan independen.

Pendekatan sosiologis semacam ini perlu dilakukan yang melihat aspek relasi kekuasaan, terlebih lagi bila representasi kekuasaan itu adalah pemerintah. PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan karena itulah penelitian ini semakin penting dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kemitraan antara PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dan Petani di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Relasi kuasa berjalan dalam kemitraan antara PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dengan Petani di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana aktor memainkan peran dalam membangun kemitraan antara petani, perusahaan dan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk dan poin-poin kemitraan antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dan petani di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
2. Menganalisis elemen dan pola kekuasaan dalam kemitraan antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dan petani di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
3. Menganalisis peran-peran yang dimainkan oleh aktor-aktor yang terlibat aktif dalam membangun kemitraan antara petani, perusahaan

dan pemerintah dalam kasus PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berwujud teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis penelitian ini antara lain:
 - a. Memperkaya khazanah kajian ilmu sosiologi pedesaan pada umumnya dan kajian kekuasaan dan interaksi sosial pada khususnya.
 - b. Memperkaya kajian tentang hegemoni pada masyarakat petani dimana terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam setiap praktik kemitraan antara perusahaan dan petani.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi para petani penangkar, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi gerakan sosial tentang upaya perbaikan nasib diri dan kesejahteraan ekonomi pada umumnya dan langkah strategis dalam membangun kemitraan dengan korporasi pada khususnya.
 - b. Bagi PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagaimana semestinya hak dan kewajiban korporasi dalam melakukan kerjasama dengan petani.
 - c. Bagi pemangku kebijakan daerah Kab. Sidrap maupun Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini dapat menjadi saran dalam membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama hubungan (*Partnership*) antara dua pihak dalam kegiatan ekonomi. Kerjasama atau hubungan cukup permanen atau berkelanjutan untuk waktu yang cukup lama/panjang. dan diikat oleh beberapa persetujuan (*agreement*) yang mengikat hubungan kerjasama tersebut (Simanjuntak, 1999). Kemitraan mengandung makna sebagai tanggungjawab moral. Ini berarti masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan, masing-masing memiliki keterbatasan, baik dibidang manajemen, penguasaan iptek maupun penguasaan sumberdaya. Untuk mencapai keberhasilan dalam mitra, mereka harus saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing (Hafsah, 1999).

Kemitraan dilakukan dengan dasar kemampuan dan kontribusi dilakukan dengan seimbang. Kalau tidak, maka yang lemah akan ditelan oleh yang kuat atau kerjasama tersebut hanya dilakukan berdasarkan rasa belas kasihan. Selain itu juga harus ada saling ketergantungan dan keterkaitan usaha karena kepentingan yang sama dan saling menguntungkan agar kerjasama tersebut efektif dan berkesinambungan. Kemitraan tidak boleh bersifat substitusi dan situasional dimana salah satu pihak memperlakukan mitra usahanya hanya apabila diperlukan saja dan sewaktu-waktu dapat diganti (Thee Kian Wie, 1992).

Pada dasarnya tujuan dari kemitraan adalah "*Win-win Solution Partnership*". Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipertimbangkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah :

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan masyarakat dan usaha kecil.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- 5) Memperluas kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan Kemitraan yang dilakukan PT. Sang Hyang Seri (persero) Cabang Sidrap adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan dan sebagai upaya pemberdayaan petani. Sedangkan dari pihak petani penangkar kemitraan ini merupakan salah satu alternatif untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka juga sebagai sarana untuk alih teknologi, pengetahuan, dan keterampilan.

B. Bentuk Kemitraan

Esensi kapitalisme Bagi Karl Marx pertama-tama dan terutama adalah hubungan antar manusia, bukan hubungan antara manusia dengan benda, apalagi hubungan di antara benda-benda. Di sini hubungan antara manusia yang dimaksud adalah hubungan antara pemilik alat-alat produksi yang tujuan utamanya adalah meraih keuntungan tanpa batas, dan mereka yang terasing dari alat-alat produksi yang untuk hidup mereka harus menjual tenaganya kepada pemilik alat-alat produksi. Dalam Manifesto Komunis, Marx dan Engels menyebut yang pertama sebagai kelas borjuasi dan yang kedua sebagai kelas proletariat.

Hubungan kelas ini dimulai dari proses dimana borjuasi datang ke pasar untuk membeli tenaga kerja buruh pada harga tertentu. Di sisi lain, sejak buruh terlepas dari alat-alat produksi, maka untuk bisa hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, mereka pergi ke pasar kerja untuk menjual tenaganya kepada borjuasi. Proses ini berakhir ketika terjadi kesepakatan dengan memiliki tenaga kerja, borjuasi berhak menggunakan, mengatur, dan mengontrol tenaga kerja tersebut untuk menghasilkan komoditi yang akan dipertukarkan di pasar.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan utama borjuasi di sini adalah akumulasi keuntungan tanpa batas. Artinya, bukan keuntungan itu sendiri yang penting, tapi keuntungan yang terus berulang dan membesar. Tetapi, agar keuntungan lebih yang berulang semakin

besar itu berlangsung, maka borjuasi tidak hanya memikirkan soal produksi (yang menghasilkan keuntungan) tapi juga reproduksi (yang membuat keuntungan menjadi kian berlebih). Pada titik inilah peran kelas pekerja bukan hanya menjadi produsen barang tapi sekaligus menjadi konsumen.

Melalui upah yang diterimanya dari borjuasi, mereka pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang diproduksinya. Pada sisi borjuasi, dengan terus berlangsungnya siklus produksi dan reproduksi kapital ini maka keuntungan semakin membesar, yang berarti sistem ini semakin kuat. Lebih lanjut Meszaros mengatakan, sebagai sistem yang organik, kapitalisme dicirikan oleh yang pertama, Capital, selain sebagai perwakilan dari kondisi-kondisi produksi material yang teralienasi, tapi juga sebagai personifikasi kekuasaan material, kedua, Buruh, yang secara struktural tidak memiliki kontrol terhadap alat-alat produksi dan kondisi-kondisi produksi, reproduksi dan perluasan skala ekspansi kapital, dan pada saat yang sama sebagai subyek riil dalam produksi dan personifikasi buruh yang secara defensif menentang capital, dan ketiga, Negara, yakni struktur yang secara politik mengelola sistem kapital yang antagonistik, yang merupakan benteng terakhir dalam menjamin keberlangsungan antagonisme yang tak terdamaikan ini, dan untuk menundukkan buruh, karena kekuatan buruh sangat berpotensi untuk meledakkan sistem ekonomi yang eksploitatif ini.

Dengan melihat kapitalisme sebagai sistem yang organik (sebagai lingkaran setan kapitalisme), maka Lebowitz menyimpulkan, “kita tidak bisa mengubah satu hal tanpa mengubah semuanya.” Artinya, tidaklah cukup melawan kapital dan kapitalisme dengan hanya merebut kekuasaan negara, atau sekadar berkuat pada pengambilalihan sektor produksi tanpa memperhatikan pentingnya sektor distribusi dan konsumsi, atau fokus pada sistem ekonominya namun mengabaikan pentingnya kekuasaan negara.

Perlawanan yang bersifat spontan dan partikular, pada saat tertentu bisa mengguncang bangunan struktur kapitalisme, tapi pada akhirnya kapitalisme berhasil merestorasi dirinya dan menjadi lebih kuat. Usaha-usaha pertanian organik, yang sebelumnya ditujukan untuk melawan produk pertanian anorganik yang merusak lingkungan, pada awalnya sanggup memaksa borjuasi untuk meredam penggunaan pestisida dan ramuan kimiawi lainnya secara besar-besaran. Tetapi, pada akhirnya pertanian organik ini menjadi komoditi baru di samping komoditi anorganik yang dipertukarkan di pasar. Perlawanan petani organik pada akhirnya diserap oleh sistem kapitalisme itu sendiri.

Salah satu bentuk kemitraan dapat dirujuk pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008). Dalam pasal ini disebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Pasal 26 huruf f UU 20/2008 memberikan contoh bentuk kemitraan lain yaitu seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*), namun ketentuan tersebut telah dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Kemitraan dalam bahasa Inggris disepadankan dengan kata *partnership*, yaitu "*the relationship which subsist between persons carrying on a business with a view to profit.*" *Partnership* merupakan suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Ibrahim, 2006:26). Cheeseman mengembangkan teori kemitraan sendiri. Baginya, kemitraan adalah persekutuan secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang (Ibrahim, 2006:26).

Mohr dan Spekman lebih melihat pada aspek fungsi kemitraan, yakni sebagai hubungan strategik yang secara sengaja dirancang atau dibangun di antara perusahaan-perusahaan. Mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama, dan saling kebergantungan yang tinggi (Jane, 2011:193).

Sedang Farazmand menambahkan, “kemitraan menyiratkan sebuah upaya bersama dan dengan sukarela menuju tujuan bersama. Dalam konteks tata kelola yang baik, kemitraan sangat penting dan membutuhkan partisipasi murni dari para pemangku kepentingan, yang berarti semua warga negara memiliki andil dalam proses tata kelola,” (Mardiyanta, 2011: 15).

Kemitraan bisa melibatkan banyak pihak, termasuk melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hubungan yang terjadi antara masyarakat sipil, pemerintah dan/atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian, juga dapat disebut sebagai pola kemitraan (Sumarto, 2009: 116).

Sebuah kerjasama kemitraan dapat ditandai melalui ciri-cirinya. Setidaknya terdapat tiga karakteristik kemitraan sebagaimana dijelaskan oleh Anderson: pertama, timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang, melainkan dari masing-masing pribadi para pihak. Kedua, selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya. Ketiga, pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya (Ibrahim, 2006:26).

Keberhasilan kemitraan ditentukan oleh kondisi-kondisi pendukungnya. Kouwenhoven berpendapat tentang beberapa kondisi yang menjamin keberhasilan kerjasama kemitraan, yaitu: a). saling percaya, b). ketidakjelasan dan pencatatan tujuan dan strategi, c). ketidakjelasan dan pencatatan pembagian biaya, risiko dan pengembalian, d). ketidakjelasan dan pencatatan pembagian tanggung jawab dan wewenang, e). penahapan proyek, f). pengaturan konflik yang telah ditetapkan sebelumnya, g). legalitas, h). perlindungan kepentingan dan hak pihak ketiga, i). fasilitas pendukung dan kontrol yang memadai, j). pemikiran dan tindakan yang berorientasi bisnis dan pasar, k). koordinasi 'internal', dan l). organisasi proyek yang memadai (Kooiman 1993:125).

Kemitraan dilaksanakan dengan berbagai macam pola. Praktik implementasi kemitraan dapat merujuk pada pasal Pasal 87 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 26 UU 20/2008. Dalam pasal ini disebutkan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; rantai pasok; dan bentuk-bentuk kemitraan lain.

Kata pola menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994) adalah suatu model, sistem, cara kerja (pemerintahan) atau bentuk (struktur) yang tetap. Bentuk kemitraan diilhami dari fenomena biologis, kehidupan organisme, dan mencoba mengangkatnya ke dalam pemahaman filosofis

(Sulistiyani, 2004:130-131). Bentuk kemitraan yang berasaskan kehidupan organisme biologis dibedakan menjadi tiga macam.

1. *Pseudo partnership* (kemitraan semu).

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing

dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Ketiga, kemitraan konjugasi.

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Selain kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas organisme biologis, ada pula bentuk kemitraan yang dibangun berdasarkan azas kehidupan organisasi pada umumnya (Sulistiyani, 2004:131-132). Dalam hal ini juga terdapat tiga macam:

1. Bentuk subordinatif (*subordinate union of partnership*).

Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan

lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. Bentuk linear (*linear union of partnership*).

Yaitu kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. Bentuk kolaboratif (*Linear collaborative of partnership*).

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi. Adapun bentuk Kemitraan diantaranya, kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, kemitraan antar aktor sosial ini, salah satunya, bisa berupa kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Tipe kemitraan jenis ini sudah diatur dalam peraturan perundangan. Misalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di dalam undang-undang ini terdapat amanah yang mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi

pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani mengatakan, “aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut bermaksud baik, membangun kemitraan dengan masyarakat. Namun, di lapangan pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasinya karena masih adanya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan, gubernur dan bupati/wali kota serta pemangku kepentingan lainnya (Beritasatu, 13 Desember 2018).

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah aturan untuk memudahkan pelaku usaha perkebunan. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit bisa menjadi acuan pendataan lahan perkebunan sawit. Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian Bambang menegaskan porsi 20% yang dimintakan kepada pengusaha sawit adalah di luar HGU yang sudah dimiliki. Artinya, pengusaha harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain

yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan Perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat mengusung semangat pembangunan masyarakat sipil (*civil society*). Pengertian masyarakat sipil ini secara sederhana dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat madani. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban (Hasim 2010:55).

Masyarakat sipil juga bisa diartikan sebagai ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan, dan lain-lain yang secara

keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta (Sumarto, 2009:15).

Kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah selain bermitra dengan masyarakat, perusahaan juga bisa bermitra dengan pemerintah. Dalam tipe kemitraan ini, perusahaan sebagai aktor sosial disebut sebagai swasta. Pelaku sektor swasta ini bisa saja mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal (Sedarmayanti, 2009 : 280).

Sedangkan pengertian pemerintah (*government*) dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc*". Atau dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya (Sedarmayanti.2009:272).

Kemitraan antara perusahaan swasta dengan pemerintah diatur dalam undang-undang. Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/masyarakat dapat mengarah pada tiga skenario, di antaranya: pertama, pola kemitraan kontra produktif. Hal ini terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional, hanya mengutamakan kepentingan stakeholder atau mengejar profit sebesar-besarnya. Sistem kontra produktif tersebut rentan terjadi hegemoni.

Hegemoni mencakup sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya kelompok-kelompok penguasa atau pihak-pihak yang dominan menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam masyarakat melalui konsensus (persetujuan) terhadap yang dikuasai atau didominasi. Lewat konsensus tersebut, kelompok penguasa melakukan hegemoni secara halus yang terlegitimasi. Sehingga pihak yang terhegemoni kadang tidak menyadari. Hegemoni merupakan sesuatu yang diciptakan atau didesain, diperoleh dan bisa dibagi (Bocock, 1986 : 33).

Kedua, Pola Kemitraan Semi produktif. Pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Ketiga, Pola Kemitraan Produktif. Menempatkan mitra sebagai subyek, dan terlaksananya simbiosis mutualisme. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan (Wibisono, 2007: 104).

Pemerintah bermitra negara perusahaan swasta karena memang tanggung jawabnya, sebagai pihak yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara, meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu (BPS Kab Nganjuk 2011:31). Bahkan, politisi dan pemerintahanlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari kita adalah penerima yang pasif (Sumarto 2009:2).

Di masa depan, pemerintah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, pemerintah yang bercorak wirausaha. Suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya : pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kedua, Akuntabilitas publik. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik.

Ketiga, pemerintah dan pemerintahan yang baik. Secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Keempat, transparansi. Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak (Sarundajang, 1999: 228-237). Jika empat ciri ini terwujud maka kemitraan pemerintah dengan perusahaan swasta khususnya dan masyarakat umumnya akan terwujud dengan baik.

C. Relasi Kuasa Dalam Kemitraan

Relasi kuasa banyak dipopulerkan oleh Michel Foucault, salah seorang filsuf pelopor strukturalisme. Konsep kekuasaan Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Menurut Foucault kekuasaan ada dimana-mana, tidak sebatas dimiliki oleh negara atau kelompok tertentu sebagaimana menurut Nietzsche. Dimana ada relasi, disitu terdapat kekuasaan. Kuasa akan terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan adalah sebuah strategi dan strategi berlangsung di mana-mana, di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi (Khozin, 2012 : 140).

Foucault memahami bahwa kekuasaan bekerja melampaui dari cara-cara hegemonik, mengingat kekuasaan ada pada setiap relasi sedang relasi ada dimana-mana. Konsepsi tentang tubuh adalah bagian sentral dalam beroperasinya relasi kekuasaan. *Disiplinary power* dilihatnya sebagai gambaran kekuasaan yang beroperasi pada tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna. Perluasan dari *disiplinary power* adalah *governmentality* yang dijalankan oleh negara. Sehingga menurut Foucault melalui *governmentality* yang dijalankan oleh negara, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial (Nur dan Suratman 2020 : 99).

Lebih lanjut Foucault melihat kehendak kebenaran tidak lain dari kehendak untuk berkuasa. Kekuasaan satu dimensi dari relasi. Kekuasaan tidak dimiliki dan di praktekkan dalam suatu ruang lingkup

dimana ada posisi strategis antara satu dengan yang lain. Melainkan kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan selalu ada dalam jalinan hubungan sosial. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan atau pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Kekuasaan direpresentasikan dalam realitas dengan dua cara yakni dengan cara kekerasan (misal ancaman, bom) dan cara terselubung, lebih halus (ilmu pengetahuan, lembaga-lembaga pendidikan, budaya). Relasi kuasa beroperasi pada tingkat pemikiran hingga tubuh yang pada akhirnya mengintervensi perilaku seseorang (Arifudin, 2019 : 2-3).

Foucault juga memahami bahwa sejak dahulu manusia telah menjadi objek dan target kekuasaan. Manusia telah dimanipulasi, dibentuk dilatih dan dikendalikan. Istilah kekuasaan menunjuk pada hubungan bermitra atau berelasi. Kekuasaan erat hubungannya dengan pendisiplinan. Wacana pendisiplinan memuat asas spasialisasi bahwa satu tempat untuk setiap orang. Tempat itu menentukan siapa dan apa seseorang itu (Putri, 2020 : 39). Kekuasaan selalu beroperasi pada hubungan kemitraan. Dalam kekuasaan niscaya melibatkan pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai, hubungan sosial adalah hubungan kekuasaan.

Pandangan Foucault tentang kuasa bisa disimpulkan bahwa “kuasa ada di mana-mana, bukan karena ia merangkul apa saja, tetapi ia muncul dari mana-mana. Kuasa tidak bisa diperoleh, ditangkap, atau dibagi, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki (*possessed*) (Hutagulung, 2004 : 7). Seperti halnya dengan hegemoni, relasi kuasa terjalin dalam

infrastruktur (hubungan produksi ekonomi) maupun suprastruktur (budaya). Relasi kuasa akan memunculkan hegemoni, Sehingga hegemoni juga ada dimana-mana. Bedanya, hegemoni adalah sesuatu yang diperoleh atau diciptakan, ditangkap dan bisa dibagi.

Adapun dalam penelitian ini penulis memakai teori Hegemoni Gramsci, Teori hegemoni berasal dari pemikir Marxist asal Italia yang bernama Antonio Gramsci. Teori ini dapat dikatakan salah satu teori politik terpenting dari begitu banyak yang ada pada akhir abad ke-20. Teori hegemoni mencakup sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya kelompok-kelompok penguasa atau pihak-pihak yang dominan menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam masyarakat melalui konsensus (persetujuan) terhadap yang dikuasai atau didominasi. Dengan demikian, kebudayaan dan masyarakat tidak lain merupakan perwujudan dari upaya-upaya hegemoni yang justru diterima secara konseptual oleh mereka yang terhegemoni. Berbeda dengan konflik atau resistensi, hegemoni proses penguasaan berlangsung canggih dan halus karena menyasar kepada kesadaran-kesadaran yang menentukan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan tindakan-tindakan masyarakat (Bocock, 1986:33).

Sebelumnya, Gramsci melihat Marxisme atau Ekonomisme yang menganggap sejarah bergerak mengikuti pertumbuhan dan perkembangan kekuatan-kekuatan produksi sebagai sesuatu yang cacat. Salah satu asumsi Marxisme bahwa dalam sistem kapitalis, kaum proletar

makin lama akan makin dimiskinkan. Pada akhirnya mereka akan memberontak dan melakukan revolusi untuk lepas dari kondisi yang menyengsarakan tersebut. Gramsci dalam hal ini memandang Marxisme sebagai determinisme mekanis, dan determinisme mekanis melahirkan sikap pasif. Kondisi demikian karena kepercayaan kaum pekerja bahwa kontradiksi dalam kapitalisme akan berkembang dan gerakan massa revolusioner akan muncul dengan sendirinya membawa ke sosialisme. Hal ini menyebabkan proletar hanya menunggu keruntuhan ekonomi kapitalis dan tidak siap dengan inisiatif-inisiatif politis hegemonik (Siswati, 2017 : 15).

Konsep hegemoni sendiri, dalam pemikiran Marxisme, awalnya diperkenalkan oleh George Plekhanov dan juga Vladimir Lenin. Plekhanov menuliskan bahwa kondisi obyektif yang ada di Rusia (pada saat sebelum Revolusi Bolshevik) membutuhkan model perjuangan yang baru, yang menjadi syarat untuk menghasilkan “pukulan mematikan” untuk menjungkalkan tatanan lama (*old order*) yang telah berurat-akar. Jantung perjuangan model baru ini adalah aktivitas politik harus mempunyai atau memainkan peran utama dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan, dan setiap bagian dari model perjuangan politik yang baru tersebut harus mampu mencoba, menciptakan dan menjaga posisi yang dominan dalam menciptakan hegemoni kelas, atau yang disebut gegemoniya. (Daniel Hutagalung. 2004)

Hegemoni juga mencakup peran kelas kapital dan anggotanya untuk merebut kekuasaan negara maupun mempertahankan kekuasaannya. Lenin memahami bahwa hegemoni adalah suatu aliansi antar kelas yang berkepentingan sama. Gramsci menambahkan dimensi baru atas konsep hegemoni yaitu dimensi nasional kerakyatan. Artinya, suatu kelas tidak dapat menggapai kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik jika kelas-kelas tersebut hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Oleh karena mereka juga harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan kelas lain yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan hubungan produksi. Bagi Gramsci, hegemoni mempunyai dimensi kelas dan dimensi nasional kerakyatan (Siswati, 2017 : 16).

Gramsci kemudian menjelaskan peran penting kaum intelektual dalam konsep hegemoninya. Menurut Gramsci, hubungan antara kaum intelektual dan wilayah produksi (dalam istilah Marx hubungan produksi) bersifat tidak langsung, tidak seperti kelompok-kelompok sosial yang secara fundamental masuk ke dalam hubungan tersebut (misal: buruh, pemilik modal), tetapi dalam tingkat yang berbeda, yang "dimediasi" oleh keseluruhan produksi yang dihasilkan masyarakat dan kompleksitas wilayah superstruktur, di mana kaum intelektual merupakan para fungsionarisnya. Gramsci melanjutkan, bahwa sudah semestinya dimungkinkan untuk mengukur kualitas organik berbagai macam strata intelektual, dan tingkat hubungan mereka dengan kelompok-kelompok sosial fundamental, dan untuk membangun sebuah skala perubahan

fungsi-fungsi mereka dan juga wilayah superstruktur dari bawah ke atas. (Daniel Hutagalung. 2004).

Hegemoni bisa dilakukan oleh kelas dan kelompok mana saja. Kelas kapital dan anggotanya memakai hegemoni untuk merebut kekuasaan negara maupun mempertahankan kekuasaannya. Sedang kelas proletar melakukan hegemonik untuk perlawanan, dan penggulingan kekuasaan. Hegemoni melibatkan banyak pihak, termasuk pihak yang tidak memiliki kepentingan secara langsung. Hegemoni, juga melibatkan berbagai macam alat termasuk media, lembaga, kebijakan, perjanjian kerja dll. Sehingga hegemoni bekerja secara halus dan terkesan natural. Hegemoni bisa sebagai jembatan eksploitasi dan bisa juga sebagai alat emansipatoris. Semua bergantung bagaimana dan kelompok mana yang mengoperasikannya. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana pengoperasian hegemoni dalam kemitraan, dan siapa yang dominan melakukan.

Penelitian ini penulis juga mencoba mengamati dari perspektif teori pertukaran, sosial exchange, Skinner mengemukakan bahwa umumnya perilaku dapat dibedakan menjadi perilaku alami (*innate behavior*) dan perilaku operan (*operant behavior*). Perilaku alami dibawa sejak lahir berupa refleks dan insting, sedangkan perilaku operan dibentuk melalui proses belajar. Oleh karenanya perilaku operan adalah perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan (Wardi Bahtiar, 2010 : 268-269). Kebanyakan perilaku sosial adalah perilaku operan, yaitu perilaku yang

telah terstimulus dan terintervensi oleh faktor luar (Durkheim menyebutnya fakta sosial).

Ketika menjelaskan perilaku manusia, Skinner berangkat dari percobaan dengan menggunakan sampel binatang. Ia berpandangan bahwa hukum yang dimiliki oleh organisme tunggal juga akan ditemukan pada organisme lain. Dengan kata lain hukum yang menguasai tikus, merpati ataupun hewan lain juga akan berlaku pada manusia. dari hasil percobaannya dengan tikus dan Merpati, Skinner melihat binatang berperilaku jika diberikan stimulus atau ganjaran, seperti tikus selalu menabrak palang dalam sangkar karena dengan menabrak palang akan keluar makanan. Atau merpati yang selalu mematok cahaya warna merah dalam sangkarnya karena setelah mematok makanan keluar. Begitupun yang berlaku dengan manusia, perilakunya akan selalu berulang manakala mendapatkan ganjaran atau *reward* (Susilo 98-100).

Mekanisme kerja pertukaran sosial ialah ketika seseorang mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukan. Semakin besar ganjaran atau hadiah itu, semakin besar perilaku tersebut akan dilakukan atau diulangi kembali. Sebaliknya, makin tinggi pengorbanan yang akan diperoleh maka semakin kecil perilaku tersebut akan dilakukan atau diulang. Ganjaran atau hukuman tidak hanya dipahami berbentuk fisik seperti barang-barang, melainkan juga berbentuk non fisik. Perilaku dan hubungan sosial tidak lebih dari kalkulasi untung-rugi, sarat dengan kepentingan individu. Hubungan sosial akan berjalan langgeng manakala

dalam hubungan tersebut kedua pihak atau lebih sama-sama diuntungkan.

George Casper Homans mengungkapkan bahwa esensi dari kehidupan sosial adalah pertukaran, sebagian menyebutnya transaksi sosial. Hubungan sosial sebagai bagian dari pertukaran sosial dirumuskan bahwa tiap-tiap dari individu memiliki tendensi meminimalkan pengeluaran/pengorbanan (*cost*) dengan tujuan mendapatkan imbalan/ganjaran (*reward*) (Susilo, 2014 : 176). Jika pengorban tidak sesuai dengan ganjarannya maka salah satu pihak akan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan (Machmud, 2015 : 261).

Lebih lanjut Homans melihat tindakan sosial sebagai sesuatu yang ekuivalen dengan tindakan ekonomis. Dimana suatu tindakan dikatakan rasional berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Selain itu, dalam berinteraksi aktor juga mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (*cost benefit ratio*). (Ritzer, 2016 : 78). Homans menitikberatkan bahwa kelanggengan tindakan sosial atau hubungan sosial manakala dalam hubungan tersebut terdapat keuntungan dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam hubungan sosial tersebut, maka hubungan tersebut akan menuai ketidakharmonisan.

Hubungan sosial selalu dilihat sebagai hubungan mencari keuntungan. Perilaku individu ketika berhubungan dengan individu lain berada dalam rel menyenangkan/diuntungkan dan tidak menyenangkan. Hubungan sosial bisa sama-sama menguntungkan, bisa salah satu dirugikan atau diuntungkan, bisa juga sama-sama dirugikan. Hubungan sosial atau kemitraan yang akan bertahan adalah hubungan sosial yang sama-sama menguntungkan. Hal demikian karena hubungan sosial selalu dipertukarkan dengan keuntungan atau ganjaran. Individu selalu memilih diantara berbagai pilihan dalam berperilaku sesuai dengan tingkat keuntungan yang akan dia dapatkan dalam kemitraan.

Sedikit berbeda dengan Homans. Jika Homans selalu melihat hubungan sosial yang langgeng itu karena mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari jalinan sosial tersebut. Peter M Blau melihat bahwa pertukaran sosial sangat mungkin bersifat unilateral atau berpihak pada satu orang/kelompok saja, dimana prestise dibedakan karena ego menerima keuntungan. Dalam pertukaran sosial, fakta sosial menjadi sesuatu yang amat penting (Susilo, 2014 : 267-268). Fakta sosial dianggap sebagai sesuatu yang ada dan dianggap ada berada di luar individu yang bisa mengintervensi, bahkan memaksa seseorang dalam bertindak.

Blau melihat bahwa dalam teori pertukaran, karyawan atau mitra cenderung mengembangkan hubungan berkualitas bergantung pada siapa mereka berinteraksi, bagaimana mereka berinteraksi dan

bagaimana pengalaman mereka. Ketika seseorang dalam hal ini mitra atau karyawan diperlakukan dengan baik oleh atasan, mereka cenderung memikirkan hubungan dengan pimpinannya dalam bentuk pertukaran sosial daripada pertukaran ekonomi (Tristiani, Gama dan Asiti, 2021 : 65-67). Hal inilah yang bisa menjelaskan mengapa hubungan seseorang langgeng meski secara ekonomi, politik mereka terhegemoni atau berada pada pihak tidak menguntungkan karena dalam segi yang lain ia juga diuntungkan. Pertukaran sosial adalah salah satu teori yang bisa digunakan untuk membaca bagaimana relasi kuasa beroperasi dan khususnya bagaimana hegemoni bisa muncul. Hal ini tidak terlepas karena dari praktek relasi kuasa dan hegemoni terdapat keuntungan (*reward*).

D. Peran Aktor dalam Kemitraan

Dalam sebuah kemitraan, peran aktor sangat menentukan. Dalam konteks pola kemitraan, aktor disebut sebagai para pelaku kemitraan. Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat, sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Berbagai peran dari pelaku kemitraan usaha tersebut adalah sebagai berikut (Hafsah, 2000).

Pertama, peranan utama korporasi bisa dikategorikan menjadi beberapa hal, antara lain: a) menyusun rencana usaha dengan petani

mitra untuk disepakati bersama, b) memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas produk kepada petani, dan c) menjamin pembelian hasil produksi petani sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kedua, peranan petani, yang sama pentingnya dengan peran perusahaan, antara lain: a) bersama-sama dengan perusahaan melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati, b) melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, dan c) mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam teknis usaha dan produksi.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) mendefinisikan bahwa petani adalah pelaku utama pembangunan pertanian. Petani dilihat sebagai fungsinya dalam kebijakan politik pembangunan. Karenanya, ketika Kementan menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, petani menjadi tulang punggung negara yang paling banyak diharapkan kontribusi, peran, dan fungsinya. Untuk mencapai misi tersebut, Kementan menjadikan para petani sebagai *tools* atau perangkat negara yang bisa dieksploitasi dan dibingkai dalam narasi akademik yang bermartabat, misalnya petani ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Dengan menempatkan petani sebagai tulang punggung negara maka relasi petani dan negara adalah relasi kekuasaan. Dengan bahasa yang sangat bermartabat, Kementan mengatakan bahwa pihaknya hadir sebagai fasilitator pembangunan yang

berperan untuk memberdayakan dan mendukung petani secara maksimal (Kementan, 2021).

Pembangunan dengan sistem dan paradigmanya mengandung tujuan untuk menciptakan masyarakat bangsa Indonesia menuju pada titik kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan menuntut kerjasama atau kesatuan oleh tiga *stake holders* yakni negara, bisnis dan masyarakat (petani). Pada realitanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Negara sebagai institusi sosial yang melayani kepentingan publik ringan tangan bersama pengusaha (bisnis) untuk memperdaya masyarakat. Ternyata kondisi dan kehidupan masyarakat semakin mengalami hal buruk dalam pelbagai bidang. Paham pembangunan (*Developmentalism*) menuntut kepatuhan sosial, taat, dan menyetujui pledoi negara dan pengusaha. Masyarakat terus merintih dan menangis tentang prikehidupan yang dramatis oleh kekuasaan pihak luar demi kepentingan mereka.

Negara sebagaimana dipahami mazhab Marxian bukanlah lembaga netral yang hanya mengabdikan pada suatu golongan dan melayani kepentingan kelompok dominan. Negara dan bisnis melakukan kontrol sosial terhadap rakyat dapat diidentifikasi melalui dua bentuk yaitu dominasi dan hegemoni. Dominasi selalu menekankan aspek koersif melalui aparat yang represif, pengaturan hukum, birokrasi dan lainnya. Hegemoni lebih menitikberatkan pada upaya mempengaruhi kelompok sosial yang dikuasai supaya menyetujui hubungan yang ada. Kenyataan

di lapangan menyatakan bahwa proses produksi dan distribusi terbingkai dalam dua proses; yakni dominasi dan hegemoni oleh negara (pemerintah) dan bisnis. Hanya karena dalil pembangunan yang konsekuensi lanjutnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup para petani ternyata terbalik.

Proses dominasi dan hegemoni oleh negara dan bisnis dilaksanakan sejak awal pembudidayaan sampai pada fase distribusi. Pada era menuju demokratis sembari di jalankan sistem pasar bebas praktek dominasi dan hegemoni masih terus diaktualisasikan. UU praktek monopoli dan UU perlindungan konsumen gagal dan tidak berjalan karena memang pemerintah dan bisnis sebagai kesatuan *stake holders* menjalankan kata sepakat demi kepentingan antara keduanya, sekaligus keduanya adalah agen distribusi.

Dengan implikasi hegemonis dan dominatif ini maka di tingkat masyarakat (petani) melakukan conter hegemoni sebagai aksi yang diperankan oleh negara dan bisnis (Maran, 2006:15). Dalam konteks penelitian ini, perusahaan dan petani yang bekerja sama dalam pola kemitraan akan disebut sebagai aktor-aktor sosial, yang peran dan fungsinya akan menjadi perhatian utama penelitian. Sebagai aktor, perusahaan dan petani hidup dalam sebuah jaringan yang stabil atau tidak stabil dalam waktu tertentu.

Teori jaringan aktor, salah satunya dikemukakan oleh Michel Callon. Aktor dipahami sebagai pelaku yang kegiatannya tidak lepas dari peranan aktor lain. Aktor dalam teori ini, tidak hanya berasal dari manusia melainkan juga bisa berasal dari luar manusia. Teori ini menegaskan bahwa segala sesuatu ada dan hidup dalam jaringan. Sebagian aktor akan menjadi aktan yang menjadi pengendali bagi aktor-aktor lain. Sebagian lain menjadi Intermediari yang menjadi penghubung antara aktor-aktor (Wulandari, 2018 : 2). Aktor-aktor hidup dalam sebuah jaringan yang saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Mulib (2019 : 42) Teori jaringan aktor melihat bahwa pada intinya sebuah realitas tidak berdiri diruang hampa. Aktor dimaksudkan semua elemen yang terhubung dalam sistem jaringan. Aktor didefinisikan sebagai sesuatu yang ikut bereaksi mencakup bukan hanya manusia seperti lembaga, institusi dan sebagainya. Jumlah aktor tidak terbatas dalam sebuah jaringan atau hubungan. Sehingga jaringan aktor tidak lain adalah jaringan bersama-sama dalam sebuah keterhubungan.

Para pengagas teori jaringan aktor (*aktor Networking Theory*) berpendirian bahwa segala entitas sosial berisi unsur atau aktor manusia dan non manusia yang bersama-sama membentuk relasi, translasi dan intermediari dalam sebuah jaringan. Semua aktor ini berperan dalam memelihara sebuah jaringan. Pada akhirnya jaringan yang telah terbentuk membentuk jaringan baru dengan proses yang sama. Begitu seterusnya sampai semua unsur masuk dalam jaringan yang besar (Ferdiansyah,

2017 : 14-15). Pemusatan perhatian dari teori jaringan bisa pada struktur mikro hingga makro. Aktor mungkin saja individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Hubungannya dapat terjadi dalam struktur yang lebih luas maupun dalam struktur yang sangat kecil (Taufik, 2017 : 222).

Untuk mengetahui peran aktor (*stakeholder*), hal pertama yang harus dilakukan adalah, pertama mengidentifikasi *stakeholder*. Kedua, mengidentifikasi peran masing-masing *stakeholder* sebagai *subject*, *keyplayers*, *crowed* dan *context setter*. Ketiga, mengetahui hubungan antara *stakeholder* dengan melakukan pemetaan (Mustika dkk, 2017). Dengan melakukan tahapan tersebut maka peran aktor dapat diketahui secara komprehensif dalam sebuah kemitraan. Dalam sebuah kemitraan aktor dapat menjadi subjek, yaitu pelaku dalam kegiatan kemitraan. Aktor dapat sebagai *keyplayers*, yakni aktor yang menjadi peran kunci dan aktor dapat sebagai *context setter*, yakni aktor yang memiliki kepentingan yang berpengaruh tinggi terhadap pengambilan keputusan.

Hubungan antar aktor dalam kemitraan dapat saling berkomunikasi, bekerjasama (*cooperation*), dan berkoordinasi. Komunikasi bekerja untuk menghubungkan pemahaman antar aktor, sehingga dapat menyusun dan mengembangkan sebuah program yang disepakati bersama. Menurut Mungin, bekerjasama adalah sebuah usaha bersama yang melibatkan antar individu atau kelompok untuk mencapai yang disepakati bersama. Hal ini dimungkinkan ketika aktor menyadari kepentingan sekaligus ancaman yang sama. Sedangkan koordinasi adalah usaha kerja sama

antara badan, instansi, dan unit-unit kerja dalam pelaksanaan tugas, yang dapat saling membantu dan melengkapi (Widodo dkk, 2018).

Aktor selalu memiliki kepentingan dalam sebuah kemitraan. Bryson mengungkapkan bahwa mereka adalah para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa setiap individu atau kelompok yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh keberhasilan atau kegagalan dari tujuan kemitraan. Setiap kelompok dalam kemitraan memiliki sumber daya dan kebutuhan yang harus diwakilkan dalam pengambilan keputusan. Ia membagi *stakeholder* menjadi tiga yakni *stakeholder* primer, kunci dan sekunder atau pendukung (Mardiyah, 2019).

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kemitraan beserta seluruh dilema dan paradoks di dalamnya sudah banyak dilakukan. Hamzah Turmudi, dkk., misalnya melihat betapa para pekerja transportasi online mengalami alienasi hidup karena relasi kemitraan yang dibangun oleh dirinya secara sadar dengan perusahaan. Sementara perusahaan pada perjalanannya dirasakan merugikan (Turmudi, Syarif, Fauziah, & Sulastri, 2020). Bahkan, menjadi mitra dan non-mitra sebuah perusahaan, pada kasus tertentu yang diteliti oleh Rizal Ali Akbar, tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan (Akbar, 2020).

Penelitian Rokhis Ana Musfiroh menunjukkan bahwa pola kemitraan berupa kontraktual, dimana petani mendapatkan pelatihan teknis,

bimbingan, hingga pemasaran. Namun, dalam soal pemasaran, kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan jauh lebih besar dari pada petani. Di sinilah akar ketimpangan itu terjadi. Eksploitasi dengan narasi politis dan persuasif hanya diarahkan untuk menutupi kesadaran kritis petani (Musfiroh, 2015).

Penelitian Muhammad Zakki Mubarak menunjukkan fenomena lain. Sekalipun pada suatu momentum komunikasi antara perusahaan dan buruh yang membangun relasi kemitraan berjalan baik, tetap saja selalu ada celah dimana buruh dirugikan, semisal dengan mencari celah dari latar belakang pendidikan buruh yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan buruh ini menjadi sumber masalah, mulai dari hubungan kondisional, kultural, dan fungsional yang terhambat. Artinya, buruh yang berusaha ideal tetap saja disoroti aspek kekurangannya (Mubarak, 2016).

Penelitian dari Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan. Menurutnya, Faktor-faktor seperti Komunikasi, kerjasama, kepercayaan, dan komitmen berpengaruh secara simultan terhadap kemitraan. Sementara secara parsial hanya faktor komitmen yang berpengaruh secara dominan terhadap kemitraan (Alam & Hermawan, 2017).

Persoalan komunikasi antara perusahaan dan petani yang menjalin kemitraan ini dipertegas oleh penelitian dari Undang Fadjar, yang

mengatakan bahwa pemberdayaan petani mitra agar menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif harus diperbaiki. Semua pihak perlu mengembangkan perbincangan rasional yang membawa pencerahan, membuahkkan konsensus besama untuk memperbaiki struktur kemitraan. Artinya, komunikasi yang terjadi antara petani dan perusahaan cenderung mandeg, tidak komunikatif, dan hal inilah yang menjadi alasan utama bagi buruknya struktur kemitraan tersebut (Fadjar, 2006).

Penelitian Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa lebih melihat problem sengketa antara buruh dan perusahaan yang menjalin hubungan kemitraan terlihat pada tidak adanya dukungan hukum, yang mengatur dengan detail hubungan kemitraan agar bisa menghindari kekacauan, sehingga kompetensi absolut dari pengadilan belum tercapai dengan maksimal, karena masih butuh undang-undang yang terkait sengketa dalam hubungan kemitraan ini (Widigda & Sharifa, 2019).

Beda hasil penelitian dari Muhammad Rheza Rizqiaputra Saefullah dan Gema Wibawa Mukti, yang melihat secara positif hubungan kemitraan terhadap petani. Menurutnya, kemitraan dapat menjadi faktor pendorong perubahan manajemen usaha tani kecil sehingga lebih berorientasi pada pasar modern. Perubahan manajemen usaha tani harus segera dilakukan dan hal itu tercapai dengan maksimal di bawah kordinasi kerjasama kemitraan dengan perusahaan. Sehingga perubahan itu akan lebih terlihat pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian/evaluasi, dengan indikasi/kemungkinan

dipengaruhi oleh faktor kontak dengan sumber informasi di luar masyarakatnya, keaktifan mencari sumber informasi, tersedianya media komunikasi, adanya sumber informasi secara rinci, dan faktor-faktor alam (Saefullah & Mukti, 2016).

Tabel 1. Matriks penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, 2021

No.	Tokoh (Tahun)	Tingkatan Kajian	Temuan dan Indikasi
1.	Hamzah Turmudi, Dede Syarif, Meli Fauziah dan Rini Sulastri (2020)	Alienasi kerja transportasi online sebagai paradoks dalam relasi kemitraan	Para pekerja transportasi online mengalami alienasi hidup karena relasi kemitraan yang dibangun oleh dirinya secara sadar dengan perusahaan. Sementara perusahaan pada perjalanannya dirasakan merugikan. Ditemukan adanya paradoks relasi kemitraan yang terjalin antara pengemudi transportasi online dengan pengelola sehingga melahirkan ketidakpuasan dan konflik antar kelas. Dalam kasus ini kelas tercipta karena adanya pendikotomian sistem kerja.
2.	Rizal Ali Akbar (2020)	Analisis kemitraaan PT. Benih XXX dengan Petani Buncis	Pelaksanaan penanaman budidaya buncis sistem mitra dengan PT. Benih XXX, pihak perusahaan memberi bimbingan teknis budidaya dari sebelum tanam sampai panen serta dijaminnya pasar. Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan besaran biaya dan pendapatan petani sistem mitra dan non mitra. Artinya tidak

			menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
3.	Rokhis Ana Musfiroh (2015)	Analisis Pola kemitraan Petani Tembakau dengan PT. Sadhana Arifnusa.	Pola kemitraan berupa kontraktual, dimana petani mendapatkan pelatihan teknis, bimbingan, hingga pemasaran. Namun, dalam soal pemasaran, kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan jauh lebih besar dari pada petani. Di sinilah akar ketimpangan itu terjadi. Eksploitasi dengan narasi politis dan persuasif hanya diarahkan untuk menutupi kesadaran kritis petani
4.	Muhammad Zaki Mubarak (2018)	Eksistensi Buruh dalam Komunikasi Bipartit	Sekalipun pada suatu momentum komunikasi antara perusahaan dan buruh yang membangun relasi kemitraan berjalan baik, tetap saja selalu ada celah dimana buruh dirugikan, semisal dengan mencari celah dari latar belakang pendidikan buruh yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan buruh ini menjadi sumber masalah, mulai dari hubungan kondisional, kultural, dan fungsional yang terhambat. Artinya, buruh yang berusaha ideal tetap saja disoroti aspek kekurangannya
5.	Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kemitraan antara petani budidaya jamur tiram dengan cv.	Menurutnya, Faktor-faktor seperti Komunikasi, kerjasama, kepercayaan, dan komitmen berpengaruh secara simultan terhadap kemitraan. Sementara

		asa agro corporation	secara parsial hanya faktor komitmen yang berpengaruh secara dominan terhadap kemitraan
6.	Undang Fadjar (2016)	Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur yang Belum Lengkap	Semua pihak perlu mengembangkan perbincangan rasional yang membawa pencerahan, membuahkan konsensus bersama untuk memperbaiki struktur kemitraan. Artinya, komunikasi yang terjadi antara petani dan perusahaan cenderung mandeg, tidak komunikatif, dan hal inilah yang menjadi alasan utama bagi buruknya struktur kemitraan tersebut.
7.	Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa (2019)	Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan	Problem sengketa antara buruh dan perusahaan yang menjalin hubungan kemitraan terlihat pada tidak adanya dukungan hukum, yang mengatur dengan detail hubungan kemitraan agar bisa menghindari kekacauan, sehingga kompetensi absolut dari pengadilan belum tercapai dengan maksimal, karena masih butuh undang-undang yang terkait sengketa dalam hubungan kemitraan ini
8.	Muhammad Rheza Rizqiaputra Saefullah dan Gema Wibawa Mukti (2017)	Kemitraan sebagai Faktor Pendorong Perubahan Manajemen Usaha Tani Petani Kecil Berorientasi Pasar Modern	Kemitraan dapat menjadi faktor pendorong perubahan manajemen usaha tani kecil sehingga lebih berorientasi pada pasar modern. Perubahan manajemen usaha tani harus segera dilakukan dan hal itu

			tercapai dengan maksimal di bawah kordinasi kerjasama kemitraan dengan perusahaan. Sehingga perubahan itu akan lebih terlihat pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian/evaluasi, dengan indikasi/kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kontak dengan sumber informasi di luar masyarakatnya, keaktifan mencari sumber informasi, tersedianya media komunikasi, adanya sumber informasi secara rinci, dan faktor-faktor alam
--	--	--	--

Berdasarkan pada penelitian terdahulu hanya fokus pada persoalan kemitraan, penelitian ini lebih menekankan pada relasi kuasa yang ada dan berjalan pada perusahaan dalam hal ini PT.Sang Hyang Seri (Persero) di Kabupaten Sidrap. Pada penelusuran relasi kuasa dan hegemoni antara perusahaan dan petani dalam kemitraan, ditemukan bahwa dominasi satu pihak terjadi karena ada kesepakatan yang telah disetujui bersama, dimana perusahaan sebagai pengendali jalannya proses kemitraan dan petani sebagai mitra tidak dapat memposisikan diri lebih selain menjalankan aturan-aturan dalam perjanjian tersebut, tetapi petani mitra tidak menyadari dominasi yang berjalan dalam kemitraan tersebut. Kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan

benih unggul tidak diikuti dengan bantuan modal usaha kepada petani mitra sedangkan proses usahatani dalam menghasilkan benih unggul sangat membutuhkan pemeliharaan dengan sarana dan prasarana yang maksimal dengan melaksanakan panca usahatani, sedangkan pembayaran pembelian hasil panen membutuhkan waktu yang cukup lama.

Relasi kuasa menjadi pintu hegemoni, dan hegemoni menjadi jembatan eksploitasi. Kekuasaan yang dimiliki perusahaan menyebabkan berjalannya kemitraan dengan hegemoni, dimana dominasi pihak perusahaan tanpa disadari telah membentuk aturan-aturan kemitraan yang harus dijalankan dalam bentuk kontrak perjanjian kerjasama. Tanpa adanya keterlibatan petani mitra dalam membuat kontrak kerjasama maka keinginan-keinginan pihak petani mitra tidak terakomodir dan sebaliknya keinginan-keinginan dari pihak perusahaanlah yang menjadi acuan dalam menjalankan kemitraan, sehingga relasi kekuasaan yang berjalan telah membentuk sebuah proses kemitraan yang berlangsung secara eksploitatif. Kelemahan petani mitra dengan segala aktifitas ekonominya yang terbatas telah menjadikan kemitraan sebagai salah satu upaya untuk terus berkontribusi dalam proses usahatani, kebutuhan perusahaan akan bahan baku menjadi bentuk kepastian bagi petani mitra dalam memasarkan hasil produksinya walaupun harus berhadapan dengan ketatnya sistem perusahaan, baik sertifikasi lapangan ataupun pembelian hasil produksi yang dilakukan perusahaan dalam waktu yang cukup lama.

F. Kerangka Pikir

Penggambaran kerangka konseptual relasi kuasa dalam kemitraan antara korporasi dan petani sebagaimana dibahas dalam poin-poin sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini, baik untuk memudahkan sudut pandang, jalannya analisa, hingga gambaran umum dibuat dalam sebuah skema penelitian.

Kemitraan ini terbentuk karena adanya kebutuhan perusahaan akan ketersediaan bahan baku benih padi, dimulai dengan adanya pencarian areal kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan petani dalam sebuah kelompok tani. Kelompok tani inilah yang diwakili oleh ketua kelompok tani melakukan perjanjian kerjasama sehingga menjadi sebuah kemitraan.

Kehadiran Pemerintah berfungsi sebagai kontrol secara tidak langsung mengamati jalannya kemitraan antara kedua pihak, tetapi pihak pemerintah tidak terlibat dalam pelaksanaan kemitraan.

Kemitraan yang dilakukan kedua pihak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Lingkungan sosial budaya, faktor ini banyak mempengaruhi proses pembinaan lahan atau penangkaran dan juga mempengaruhi pelaksanaan panen dan pembelian calon benih.

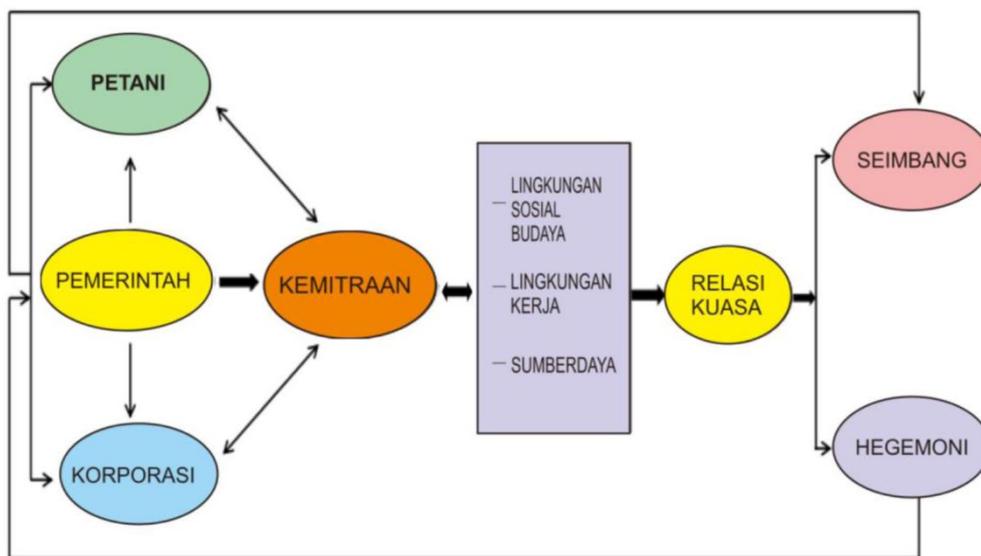
2. Lingkungan kerja, faktor ini juga mempengaruhi keberhasilan produksi dalam hal ini lingkungan kerja petani banyak dipengaruhi oleh alam dan letak yang jauh dari posisi jalan.
3. Sumberdaya, kemitraan yang berjalan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang ada. Pihak perusahaan dengan sumberdaya yang ada melakukan penyiapan areal kerjasama dan pembinaan lahan dalam penangkaran calon benih yang dilakukan petani, kemudian hasil penangkaran tersebut dibeli oleh pihak perusahaan. Sementara petani dengan sumberdaya yang ada mengusahakan penangkaran sebaik mungkin sehingga hasilnya dapat lulus sertifikasi untuk bisa dibeli pihak perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kemitraan tersebut tanpa disadari membentuk relasi kuasa yang berjalan dalam kemitraan. Faktor sumberdaya baik berupa lahan, manusia, peralatan dan finansial sangat mempengaruhi penguasaan pihak perusahaan terhadap hasil penangkaran petani.

Relasi kuasa yang berjalan dapat membentuk suatu kondisi hegemoni dimana terdapat satu pihak yang lebih dominan dalam menguasai jalannya kemitraan, tetapi relasi kuasa yang berjalan dapat juga membuat kondisi seimbang dimana antara kedua pihak yang bermitra tidak ada satu pihak yang lebih dominan menguasai jalannya proses

kemitraan. Kondisi tersebut dapat terbentuk apabila dalam pelaksanaan kerjasama hak dan kewajiban kedua pihak dijalankan dengan baik. Untuk lebih jelas perhatikan skema kerangka pikir dibawah ini.

G. Skema Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir, 2021.